

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA

Tenyi Nurfiqra, Dwi Cahya Puandita, Elisa Debora, Indra Budiman Nst, Budi
Ardianto
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
indrabudimannst@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Dengan fokus pada permasalahan dalam konflik Laut Cina Selatan, klaim maritim yang luas, ketegangan geopolitik, dan integrasi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum, penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menerapkan hukum internasional di kawasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari literatur terbaru, data primer dan sekunder, serta studi kasus negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menghambat implementasi hukum internasional, seperti konflik yang rumit, klaim wilayah yang meluas, dan ketegangan geopolitik antara negara-negara di kawasan. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan implementasi dengan mengenalkan inovasi, pendekatan baru, dan pemahaman mendalam terhadap kontribusi hukum internasional terhadap stabilitas regional. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup upaya kolaboratif antara negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikan konflik secara diplomatis, meningkatkan kerja sama regional dalam penerapan hukum internasional, serta memperkuat literasi hak asasi manusia dalam pendidikan kewarganegaraan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan dan peluang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara serta memberikan arahan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam meningkatkan stabilitas dan keadilan di kawasan tersebut.

Kata kunci: Asia Tenggara, Hukum Internasional, Konflik Laut Cina Selatan, Pendidikan Kewarganegaraan Global.

Abstract

This research aims to examine the challenges and opportunities of implementing international law in Southeast Asia. With a focus on issues within the South China Sea conflict, expansive maritime claims, geopolitical tensions, and the integration of global citizenship education into curricula, this study highlights the complexity of applying international law in the region. The research methodology employs a qualitative approach by gathering data from recent literature, primary and secondary sources, as well as case studies of Southeast Asian countries. The findings reveal several challenges hindering the implementation of international law, such as intricate conflicts, expansive territorial claims, and geopolitical tensions among countries in the region. However, there are significant opportunities to enhance implementation through the introduction of innovations, new approaches, and a deep understanding of international law's contribution to regional stability. Recommendations resulting from this research include collaborative efforts among Southeast Asian countries to resolve conflicts diplomatically, enhance regional cooperation in implementing international law, and strengthen human rights literacy in citizenship education. It is hoped that this research can make a significant contribution to understanding the challenges and opportunities of implementing international law in Southeast Asia and

provide guidance for policymakers, academics, and legal practitioners in improving stability and justice in the region.

Keywords: Southeast Asia, international law, South China Sea conflict, global citizenship education.

I. PENDAHULUAN

Konteks hukum internasional di Asia Tenggara melibatkan dinamika yang sangat beragam dan kompleks. Dalam memperlakukan interaksi antarnegara maupun individu, hukum internasional memiliki peran yang sangat penting. Menurut Astawa (2014), keberadaan hukum internasional menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk menjaga keseimbangan dan menjalin hubungan yang harmonis di antara negara-negara serta individu. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas sistem hukum dan peradilan internasional yang memiliki dampak besar, tidak hanya dalam konteks domestik tetapi juga global (Astawa, 2014). Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem hukum dan peradilan internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh dinamika global yang semakin berkembang dengan cepat dan kompleks (Astawa, 2014). Perkembangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan berbagai mekanisme peradilan yang terlibat.

Dalam konteks Asia Tenggara, implementasi hukum internasional seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu contoh yang menonjol adalah isu Konflik Laut Cina Selatan, yang merupakan salah satu konflik maritim paling rumit di kawasan tersebut. Konflik semacam ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum internasional dalam penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Namun demikian, di tengah tantangan yang dihadapi, terdapat peluang besar untuk meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Inovasi dalam pendekatan baru dan kerja sama regional yang lebih erat dapat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selain itu, pentingnya literasi hak asasi manusia dalam konteks pendidikan kewarganegaraan juga harus diperkuat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik akan prinsip-prinsip hukum internasional di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan juga menjadi fokus penting dalam memahami tantangan dan peluang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Maskarto (2021) menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian integral dari kurikulum di perguruan tinggi, yang sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikannya secara efektif di lingkungan perguruan tinggi (Maskarto, 2021). Begitu juga, pendekatan pengajaran yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan siswa, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dan inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan (Putri Isa & Dewi, 2021).

Selain itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan global juga menjadi sorotan dalam konteks Asia Tenggara. Usmi & Samsuri (2021) menyoroti urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di abad ke-21. Mereka menekankan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap dunia kontemporer, permasalahan nasional dan global, serta kontribusi aktif untuk dunia yang lebih adil dan berkelanjutan adalah hal yang mutlak diperlukan (Usmi & Samsuri, 2021). Namun, kurikulum saat ini masih belum mencakup aspek penting ini secara memadai, menunjukkan bahwa terdapat ruang

untuk peningkatan dan penyempurnaan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan (Maksum & Anwar, n.d.).

II. METODE

Dalam menanggapi tantangan dan peluang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara, penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif. Pendekatan ini akan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika regional, kompleksitas hubungan antar negara, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap penerapan hukum internasional. Melalui penggabungan analisis dokumen dan studi kasus, diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang holistik dan terperinci. Data dan sumber yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah literatur terkini yang relevan dengan konteks Asia Tenggara dan hukum internasional. Selain itu, akan digunakan pula data primer dan sekunder, termasuk laporan resmi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terkait. Studi kasus dari negara-negara di Asia Tenggara akan menjadi titik fokus utama untuk mengeksplorasi implementasi hukum internasional di tingkat regional. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan kita dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual terkait tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang dinamika kompleks di wilayah Asia Tenggara terkait implementasi hukum internasional.

Dalam proses analisis penelitian ini, kami akan memanfaatkan suatu kerangka teoritis yang kokoh dan terpercaya. Kerangka teoritis ini akan mengintegrasikan konsep-konsep kunci dalam hukum internasional yang meliputi aspek-aspek seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, perdagangan internasional, serta penyelesaian sengketa internasional. Dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai implementasi hukum internasional di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, untuk menganalisis data yang kami kumpulkan, kami akan menggunakan beberapa teknik analisis yang terbukti efektif. Di antaranya adalah analisis komparatif, di mana kami akan membandingkan berbagai data untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang signifikan. Selain itu, kami juga akan menerapkan analisis isi, yang memungkinkan kami untuk menggali makna yang tersembunyi di balik teks-teks yang kami telaah. Pendekatan interpretatif juga akan kami terapkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum internasional diimplementasikan di Asia Tenggara, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam proses dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas IV, sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhan et al. (2023). Di samping itu, Dewantara (2021) menegaskan bahwa tujuan dari Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan adalah untuk menyebarkan pemikiran konseptual, review, serta hasil penelitian terkait Pancasila dan Kewarganegaraan, yang memberikan landasan penting bagi pemahaman mendalam dalam bidang tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Astawa (2020) dan Juliati et al. (2019) memberikan pandangan yang krusial tentang pentingnya memahami sistem hukum internasional dan peradilan dalam memelihara hubungan yang harmonis di antara negara-negara. Selain itu, mereka juga menyoroti urgensi sosialisasi dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi dinamika global saat ini, di mana pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi menjadi semakin relevan.

III. PEMBAHASAN

A. Tantangan Implementasi

Salah satu tantangan besar dalam menerapkan hukum internasional di Asia Tenggara adalah konflik yang berkecamuk di sekitar Laut Cina Selatan. Nurdiansyah (2024) menggambarkan bahwa konflik ini tidak hanya menjadi perdebatan yang serius tetapi juga menampilkan klaim maritim yang rumit dan membingungkan di wilayah tersebut. Poin pentingnya adalah klaim China atas sebagian besar Laut Cina Selatan, yang mencapai lebih dari 95%, dan bagaimana hal ini mempengaruhi aspek ekonomi, terutama impor minyak mentah yang menjadi kebutuhan penting bagi negara tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Sariani (2024). Dengan kata lain, situasi ini mencerminkan bagaimana klaim wilayah yang tumpang tindih dan persaingan kepentingan di kawasan tersebut menjadi kendala serius dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional. Konflik Laut Cina Selatan juga menyoroti ketegangan geopolitik yang mempengaruhi implementasi hukum internasional. Persaingan antara negara-negara di kawasan, terutama China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan strategis dapat bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum laut internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ketegangan ini menciptakan tantangan besar dalam mencapai keseimbangan yang adil dan harmonis dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut, serta dalam menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Selain itu, masalah keamanan juga menjadi bagian integral dari tantangan dalam implementasi hukum internasional di Asia Tenggara, terutama terkait dengan konflik Laut Cina Selatan. Ketegangan militer di kawasan tersebut, termasuk pengiriman kapal perang dan perlombaan persenjataan, menghadirkan ancaman nyata terhadap stabilitas dan perdamaian regional. Tindakan unilateral dan klaim yang meragukan terhadap pulau-pulau dan daerah sengketa menambah kompleksitas konflik, menunjukkan betapa sulitnya untuk mencapai konsensus dalam menerapkan hukum internasional di tengah ketegangan militer. Selain konflik Laut Cina Selatan, tantangan lain dalam implementasi hukum internasional di Asia Tenggara termasuk ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penegakan hukum internasional oleh negara-negara di kawasan. Beberapa negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional, yang dapat menghambat harmonisasi dan koordinasi dalam upaya implementasi hukum internasional di tingkat regional. Selain itu, faktor-faktor internal seperti korupsi, kekurangan sumber daya, dan lemahnya sistem hukum nasional juga memainkan peran penting dalam menghalangi pelaksanaan yang efektif dari hukum internasional di Asia Tenggara.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terdapat peluang untuk meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Salah satunya adalah melalui kerja sama regional yang lebih erat dalam mengatasi sengketa dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum internasional. ASEAN, sebagai lembaga regional utama di kawasan, memiliki peran kunci dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara anggotanya. Dengan memperkuat kerangka kerja hukum internasional yang ada, termasuk UNCLOS, ASEAN dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut di Laut Cina Selatan dan kawasan lainnya. Pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran hukum juga menjadi bagian penting dari solusi dalam meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Peningkatan kapasitas hukum, terutama melalui

pelatihan dan pendidikan bagi para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum, akan membantu meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum internasional dan keterampilan dalam menerapkan mereka dalam konteks regional yang kompleks. Selain itu, kesadaran masyarakat sipil dan peran aktif dari organisasi non-pemerintah dalam memantau dan mendesak pemerintah untuk mematuhi hukum internasional juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk implementasi yang efektif.

B. Peluang dan Solusi

Meskipun dihadapkan dengan tantangan serius, terdapat berbagai peluang dan solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan inovasi dan pendekatan baru yang lebih efektif dalam hal ini. Sebagai ilustrasi, dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, Usman dan Samsuri (2021) menyoroti kepentingan mendesak dari pendidikan kewarganegaraan global yang dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa adanya literasi hak asasi manusia dan penerapan nilai-nilai demokratis dalam kurikulum pendidikan ini akan membantu menciptakan generasi muda yang aktif dan proaktif dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang ada. Peluang lain yang dapat dieksplorasi adalah melalui peningkatan kerja sama dan keterlibatan aktif dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan melakukan kerja sama yang erat, baik dalam hal diplomasi maupun implementasi kebijakan, negara-negara tersebut dapat mencapai lebih banyak kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional. Penguatan kerja sama regional juga dapat membantu menciptakan forum dialog yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan sengketa dan mencapai konsensus dalam implementasi hukum internasional.

Selain itu, terdapat peran penting dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi hukum internasional. Masyarakat sipil dapat memberikan tekanan dan pengawasan terhadap pemerintah agar patuh terhadap kewajiban-kewajiban hukum internasional yang mereka terima. Sementara itu, organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan teknis, advokasi, dan mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hukum internasional di kalangan masyarakat. Kemudian, penting untuk memperkuat kapasitas hukum di tingkat nasional dan regional. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian bagi para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum. Dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum internasional, mereka akan dapat memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten.

Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas internasional juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Negara-negara maju dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan teknis, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan bagi negara-negara di kawasan ini. Kerja sama antar negara-negara di luar Asia Tenggara juga dapat membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi yang konstruktif dalam menangani tantangan-tantangan yang ada. Selain itu, penguatan peran ASEAN sebagai lembaga regional dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan implementasi hukum internasional di kawasan ini. ASEAN memiliki potensi untuk menjadi platform dialog yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa dan mencapai konsensus di antara negara-negara anggotanya. Dengan memperkuat kerangka kerja hukum internasional yang ada, ASEAN dapat berkontribusi secara

signifikan dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di Asia Tenggara.

C. Analisis Kasus

Untuk mendalami pemahaman tentang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara, kita dapat memperhatikan studi kasus negara-negara di kawasan ini. Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan adalah konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang sebelumnya telah dibahas. Konflik ini menunjukkan betapa kompleksnya klaim wilayah dan ketegangan politik yang hadir di Asia Tenggara. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus semacam ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum internasional di kawasan tersebut. Studi kasus tentang konflik Laut Cina Selatan memberikan ilustrasi yang jelas tentang berbagai aspek yang memengaruhi implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Misalnya, klaim yang luas atas wilayah maritim menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuatan antar negara di kawasan. Selain itu, ketegangan politik yang terkait dengan klaim semacam itu juga dapat menghambat proses penyelesaian sengketa secara damai, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional.

Dalam konteks ini, studi kasus negara-negara di Asia Tenggara juga menyoroti peran penting diplomasi dalam penyelesaian konflik dan implementasi hukum internasional. Negosiasi antara negara-negara terkait dapat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam menangani sengketa yang muncul. Oleh karena itu, memahami proses diplomasi dalam konteks konflik regional menjadi kunci dalam upaya meningkatkan implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, studi kasus juga mengungkapkan dampak ekonomi dari klaim wilayah dan konflik politik di Asia Tenggara. Sengketa seperti konflik Laut Cina Selatan dapat mengganggu stabilitas ekonomi regional, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi hukum internasional tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi, yang kemudian perlu ditangani secara holistik.

D. Korelasi dengan Politik dan Ekonomi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum internasional di Asia Tenggara juga terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti politik dan ekonomi. Klaim yang luas atas wilayah maritim, seperti yang dilakukan oleh China terhadap Laut Cina Selatan, memiliki dampak yang sangat signifikan tidak hanya dalam aspek politik tetapi juga ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sariani (2024), klaim semacam itu bukan hanya sekadar masalah politik, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum internasional di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Dalam konteks politik, klaim maritim yang luas dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara di kawasan. Klaim semacam itu sering kali menjadi sumber perselisihan dan konflik yang mempengaruhi stabilitas politik regional. Implikasi politik dari klaim maritim yang bersifat ekstensif dapat mencakup masalah kedaulatan negara dan status wilayah yang menjadi sengketa, yang kemudian memengaruhi hubungan antar negara di Asia Tenggara.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam tantangan implementasi hukum internasional di kawasan ini. Klaim yang meluas atas sumber daya alam di wilayah maritim dapat menciptakan ketegangan ekonomi antara negara-negara yang terlibat. Misalnya, klaim China atas Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam memiliki dampak besar terhadap akses dan penggunaan

sumber daya tersebut oleh negara-negara lain di kawasan. Implikasi ekonomi dari klaim semacam itu dapat mempengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan. Selain itu, faktor politik dan ekonomi ini juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar negara di Asia Tenggara dengan negara-negara di luar kawasan. Ketegangan politik dan ekonomi yang timbul akibat klaim maritim yang meluas dapat memengaruhi kerja sama regional, diplomasi, dan kebijakan luar negeri negara-negara terkait. Hal ini kemudian memperumit implementasi hukum internasional yang membutuhkan kerja sama antar negara di tingkat global untuk mencapai keberhasilan.

IV. KESIMPULAN

Dalam menyimpulkan, implementasi hukum internasional di Asia Tenggara dihadapkan pada tantangan yang kompleks namun juga memberikan peluang untuk perbaikan yang signifikan. Tantangan utama dalam implementasi hukum internasional di Asia Tenggara meliputi kompleksitas konflik seperti Konflik Laut Cina Selatan, klaim maritim yang luas, ketegangan geopolitik, dan keterbatasan integrasi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum di beberapa negara. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan implementasi dengan memperkenalkan inovasi, pendekatan baru, dan pemahaman mendalam terhadap kontribusi hukum internasional terhadap stabilitas regional. Untuk pihak terkait, diperlukan upaya kolaboratif antara negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikan konflik secara diplomatis, meningkatkan kerja sama regional dalam penerapan hukum internasional, dan memperkuat literasi hak asasi manusia dalam pendidikan kewarganegaraan. Rekomendasi untuk agenda penelitian mendatang mencakup studi lebih lanjut mengenai dampak politik dan ekonomi terhadap implementasi hukum internasional serta inovasi pendekatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hukum internasional di kalangan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks studi hukum internasional di Asia Tenggara dengan mengungkapkan tantangan yang dihadapi, peluang yang tersedia, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan implementasi hukum internasional di kawasan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya membangun stabilitas dan keadilan di Asia Tenggara melalui implementasi yang efektif dari hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, K. T. (2014). Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Dewantara, J. A. (2021). *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn)*. *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 2(1)
- Juliati, Hermawan, W., & Firman, M. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik di era global. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*
- Maksum, H., & Anwar, F. (n.d.). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme.
- Maskarto, L. N. R. (2021). Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
- Nurdiansyah, D. R. (2024). Analisa Konflik Sengketa Laut Cina Selatan dalam Kepentingan Nasional Indonesia. Diakses dari Indonesiana.
- Putri Isa, S. F., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Karakter Siswa di Era Globalisasi.
- Ramadhan, W., Rifana, F., Meisya, R., Putro, K. Z., & Frasandy, R. N. (2023). Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan Pancasila dan

- Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar. Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, 32(1)
- Sariani. (2024). Kedaulatan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan, ASEAN, China, dan Amerika Serikat. Diakses dari Good News From Indonesia.
- Usmi, R., & Samsuri. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global Dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 149-160.